

*The Religious Economic Movement and Rural
Moslem Identity Politics (Study in BMT
Beyond Funds Arjasari Sub-District Bandung Regency)*

**Gerakan Ekonomi Keagamaan dan Politik
Identitas Muslim Pedesaan (Studi di BMT Dana
Akhirat Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung)**

Firman Nugraha

Balai Diklat Keagamaan Bandung

email: phiemanbdg@gmail.com

Abstract: The purpose of writing this article is to describe how the Islamic economy in the form of Baitul Maal wat Tamwil can portray itself as a representation of economic social movements in rural Moslems. The economic social movement is sustained by the Islamic identity politic in rural areas. Being a pious Moslem is the dream of every one. The one of characteristics of kaaffah in religion is to apply the values of Islam in all life dimensions including in the economy activity. With the study setting in Arjasari sub-district Bandung Regency and focus of this study is collectioing action on members of BMT Beyond Funds. The study was carried out through observation and interviews. The result of study shown there is a role of political identity in the success of BMT Beyond Funds as a movement of Islamic finance amid the economic struggle of rural Moslem agriculture in Arjasari. The Islamic identity politic appears in the social structure of rural communities with the majority of Moslems. The power of identity politic also gets a place through awareness, strategy and legitimacy.

Abstraksi: Tujuan penulisan artikel ini untuk mendeskripsikan bagaimana ekonomi Islam yang secara akademik lebih dikenal dengan ekonomi syariah dalam wujud baitul maal wat tamwil dapat memerankan dirinya sebagai representasi gerakan sosial ekonomi Islam bagi muslim pedesaan. Gerakan sosial ekonomi Islam ini sendiri ditopang oleh politik identitas Islam di pedesaan. Menjadi Muslim yang kaaffah, adalah dambaan setiap

umat Islam. Salah satu ciri keaffahan dalam beragama adalah menerapkan nilai-nilai agama Islam dalam seluruh dimensi kehidupan tidak terkecuali dalam perekonomian. Dengan setting kajian di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung serta fokus kajian pada BMT Dana Akhirat, dimana studi dilakukan dengan observasi dan wawancara, dapat ditunjukkan bahwa ada peran politik identitas dalam keberhasilan BMT Dana Akhirat untuk menjadi oase pembiayaan syariah ditengah pergulatan ekonomi pertanian Muslim pedesaan di Arjasari. Politik identitas Islam tampak dalam struktur sosial masyarakat pedesaan dengan mayoritas beragama Islam. Kekuatan politik identitas ini juga mendapatkan tempat melalui kesadaran, strategi dan legitimasi.

Keywords: Baitul Maal wat Tamwil, Islamic Economy, Rural Moslem Community, and Rural Moslem Identity Politics.

A. Pendahuluan

Paruh terakhir kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Suharto menunjukkan kecenderungan yang positif dalam hubungan antara Negara dengan Umat Islam. Diantara yang menandai hubungan baik ini adalah terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).¹ ICMI, pada gilirannya juga menjadi bagian yang penting dalam pembentukan Bank Muammalat Indonesia (BMI).² Lahirnya BMI menjadi penanda adanya perhatian yang lebih serius dalam hal implementasi nilai-nilai Islam (Syariah) pada aspek-aspek perekonomian umat yang menjadi nadi pembangunan.³ Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah kemudian menyusun berbagai Undang-Undang yang mendukung tentang sistem ekonomi tersebut, seperti UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia yang mendapatkan tempat dalam sektor keuangan syariah, salah satunya perbankan syariah ini, kemudian mendapatkan batu penguji pada saat terjadinya krisis moneter

pada tahun 1997-1998. BMI ternyata dapat membuktikan ketahanannya pada masa krisis ini, meski mengalami penurunan profit yang didapat. Bank Muamalat yang pada dasarnya menggunakan prinsip bagi hasil, selamat dari krisis akibat produk-produknya yang variatif, seperti contoh produk pembiayaan *Murabahah* yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi *BI rate*, sehingga sektor riil yang menggunakan pembiayaan ini juga selamat dari dampak buruk kenaikan *BI rate*. berbeda dengan apa yang dialami oleh perbankan konvensional, yang pada saat itu menyebabkan 16 bank dilikuidasi, berikutnya 38 bank, Selanjutnya 55 buah bank masuk kategori BTO dalam pengawasan BPPN.⁴

Bukan hanya dalam konteks lokal nasional, Indonesia, dalam konteks global pun perekonomian Islam lolos dari ujian yang sama. Ketika terjadi badai krisis yang sama pada tahun 2008, Laporan Reuters menunjukkan bahwa perekonomian di Negara-negara Teluk menunjukkan ketahanannya.⁵ Atas kondisi ini, Crane et. all (1993) setelah meneliti kasus pertanian yang hampir lumpuh di Amerika Serikat lantaran terkena dampak krisis tahun 1980-an merekomendasikan agar Lembaga Keuangan AS mengadopsi sistem keuangan Islam secara struktural ke sistem keuangan mereka yaitu memanfaatkan instrumen *Profit and Loss Sharing* (PLS) dalam bentuk equitas eksternal.⁶

Atas ketahanannya yang baik ini, maka tidaklah mengherankan kemudian dalam skala nasional, Tahun 2002 menjadi titik perkembangan penting tahap kedua, ditandai dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM). BSM sepenuhnya dimiliki oleh Bank Mandiri yang merupakan bank BUMN Indonesia terbesar dan terbaik. Efek berantai dari berdirinya BSM sangat luas, terutama mendorong berdirinya bank umum syariah atau unit usaha syariah bagian dari bank konvensional lainnya.⁷

Catatan Kusmanto, dkk., menunjukkan bahwa pada tahun 2015 perkembangan ekonomi Islam dalam bentuk perbankan mulai menunjukkan jumlah yang lebih baik dengan beroperasinya 12 Bank Umum Syariah dengan jumlah kantor 2.121, dan 22 Unit Usaha

Syariah dengan jumlah kantor 327 dari Bank Konvensional, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan jumlah 161 dan jumlah kantor 433, yang menyebar ke berbagai wilayah. Otoritas Jasa Keuangan Syariah, menyebutkan triwulan III-2015 total aset dari seluruh bank syariah nasional Rp.282,162 triliun atau 4,63% dari seluruh total aset perbankan nasional. Kondisi tersebut menunjukkan potensi pasar yang masih luas dan besar untuk dikembangkan.⁸

Melihat kondisi yang menunjukkan kecenderungan membaik dalam pertumbuhan perekonomian Islam, artikel ini akan mencoba untuk melihat dalam perspektif politik identitas. Hal ini berangkat dari dugaan bahwa pertumbuhan yang positif dalam pembiayaan syariah, bukan hanya karena ketahanannya, melainkan juga adanya politik identitas yang dibangun umat Islam dalam merealisasikan prinsip-prinsip Islam (syariah) termasuk dalam perekonomian. Tujuan utama artikel ini untuk menemukan jawaban apa dan bagaimana politik identitas berperan dalam penguatan ekonomi Islam yang dalam tataran praksisnya berbentuk lembaga keuangan syariah, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) di perdesaan.

B. Wacana dan Praksis Gerakan Ekonomi Islam

Gerakan Sosial Islam, mengacu kepada konsepsi tentang gerakan sosial seperti dikemukakan sebelumnya berarti sebuah gerakan yang dilakukan umat Islam untuk melakukan perubahan atau bahkan mempertahankannya. Secara lebih luas, Gerakan Islam merupakan rangkaian pemanfaatan peluang kesempatan politik dalam rangka merestorasi sistem sosial, politik, budaya dan pembentukan ulang identitas umat Islam. Gerakan ini juga dapat dimasukkan dalam kelompok masyarakat yang tersingkir, kemudian melakukan pengorganisasian diri untuk menyatakan eksistensinya. Suatu aksi sosial kolektif dalam bentuk gerakan dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi aktor gerakan untuk mencari identitas dan pengakuan melalui aksi ekspresif, melalui tuntutan universalistik. Tuntutan ini dengan melibatkan banyak aktor

gerakan secara langsung dalam aksi ekspresif. Konsep ini mewakili konsepsi gerakan sosial baru, yang lebih luas mengakomodir ide gerakan. Sementara itu seperti sudah diulas sebelumnya, teori gerakan sosial lama lebih melihat pertentangan kelas sebagai motif gerakan.

Setiap gerakan, dalam perspektif gerakan sosial baru, menyadari pentingnya kehadiran ideologi. Tanpa ditopang ideologi, keberadaan suatu gerakan sosial hanya akan menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan. Karena itu, gerakan sosial perlu merumuskan kerangka ideologinya yang berisi: *Pertama*, pernyataan tujuan gerakan. *Kedua*, kumpulan kritik dan penilaian terhadap struktur yang akan diubah. *Ketiga*, kumpulan doktrin yang bisa menjustifikasi tujuan gerakan. *Keempat*, seperangkat kepercayaan yang berhubungan dengan kebijakan, taktik, dan pelaksanaan gerakan dan *kelima*, mitos gerakan.⁹

Gerakan ekonomi Islam kontemporer dalam pandangan Oliver Roy senada dengan gerakan politik Islam. Dia melihat kebangkitan kesadaran ekonomi Islam paralel dengan visi syariatisasi yang menjadi ciri khas kebangkitan Islam abad 20.¹⁰ Dia meyakini ada perbedaan konsepsi ekonomi Islam hari ini dengan di masa awal Islam. Konsep ekonomi pada masa permulaan lebih menekankan kepada pengaturan zakat, penolakan *riba* juga *gharar*, berbeda dengan masa kini yang dimensinya sudah sedemikian luas sebanding dengan perkembangan ekonomi kekinian.

Perspektif sosiologi, ekonomi merupakan salahsatu aktifitas manusia. Suatu aktifitas yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas. Berarti aktifitas ekonomi sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri.¹¹ Menurut Akhmad Mujahidin, gambaran diferensiasi kerja yang ditunjukkan oleh anak-anak Nabi Adam yaitu Habil yang peternak dan Qabil yang petani merupakan sebuah aktivitas ekonomi. Peristiwa tragis yang kemudian terjadi pada anak-anak Nabi Adam ini merupakan buah dari aktivitas ekonomi yang berupaya memperoleh keuntungan optimal dengan pengorbanan minimal. Qabil

yang berkorban dengan hasil pertanian harus menderita “kerugian” karena tertolak. Akhirnya melahirkan tindakan ekonomi berikutnya yaitu “membunuh” pesaing yaitu Habil.¹²

Persoalan-persoalan kemanusiaan salahsatunya adalah kesejahteraan. Dalam perspektif ekonomi di mana manusia sebagai pelaku ekonomi masih ditemukannya ketimpangan baik dalam produksi, distribusi maupun capaian hasil dari tindakan ekonomi. Ekonomi kapitalis yang saat ini dianggap sebagai ujung dari peradaban menjadi penanggungjawab atas ketimpangan-ketimpangan tersebut.¹³ Umat Islam, menjadi bagian dari pihak yang terlibat dalam kendala ini. Sementara itu, Islam sendiri sebagai agama maupun sumber nilai, memiliki gagasan sosial yang sangat menarik terutama dalam konteks keadilan, termasuk dalam keadilan ekonomi.¹⁴

Gagasan ekonomi Islam sendiri bersumber dari al Quran dan Assunah.¹⁵ Visi Islam untuk mewujudkan keadilan merupakan visi Qurani yang dalam tataran praksisnya adalah sunnah Nabi. Nilai-nilai tersebut menjadi etika dalam ekonomi Islam. Inilah yang menjadikannya berbeda dengan sistem lainnya. Ia membentuk pandangan dunia sebagai sasaran dan strategi (*maqashid al-syari'ah*) yang berbeda dengan sistem sekuler dan sedang menguasai dunia saat ini.¹⁶ Ekonomi Islam tidak menekankan pada materialisme, tetapi pada kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) atas dasar persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosial ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual umat manusia.¹⁷

Individu menurut sistem ekonomi Islam memiliki ruang yang bebas, tetapi terkendali. Pengendalinya adalah nilai atau moral berdasarkan syariah, yang tidak mengekang kebebasannya secara berlebihan. Kebebasan individu yang tidak terkendali menyebabkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, lembaga keluarga dan solidaritas sosial, serta melemahkan atau memudahkan ikatan moral.¹⁸ Pengendalian kebebasan individu untuk mencapai keadilan,

yang akan membawa efisiensi dan pertumbuhan yang lebih besar, dan meningkatkan kedamaian dan solidaritas sosial, serta insentif bagi upaya meningkatkan inovasi yang lebih besar.

Menurut Maulidizien¹⁹ etika sistem ekonomi yang luas ini menekankan keadilan dan produktivitas, kejujuran dalam perdagangan serta kompetisi yang *fair*, pelarangan terhadap penimbunan kekayaan dan pemujaan berlebihan terhadap harta tersebut, serta perlindungan manusia dari kebodohan mereka sendiri dan pemborosan. Lebih jauh, Maulidizien menjelaskan tentang justifikasi pelarangan etika ekonomi terhadap larangan melakukan riba, terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu ditekankan kembali, yaitu; riba merupakan tindakan tidak adil, eksploitatif, dan tidak produktif. Dalam hubungan tradisional dan berbasis bunga antara kreditur dan debitur, debitur akan sendirian menanggung kerugian atau meraih keuntungan yang sangat tinggi. Sebaliknya, kreditur mendapatkan uang apapun yang terjadi pada hasil usaha atau bisnis tersebut.²⁰Islam mengajarkan risiko kerugian ditanggung bersama-sama.²¹ Dengan kata lain, daripada mengumpulkan kompensasi tetap yang ditentukan sebelumnya dalam bentuk bunga, kreditur selayaknya dihargai suatu bagian dari setiap keuntungan dari bisnis yang telah mereka bantu keuangannya. Dalam argumen yang lebih luas dapat dikatakan bahwa segala keuntungan seharusnya dijustifikasi secara moral dan ekonomi.

Praksis dari gagasan ekonomi Islam saat ini yang paling menemukan bentuknya adalah pembiayaan syariah, baik berupa perbankan maupun *Baitul Maal Wa Tamwil*.²²Pada tahun 2015 seperti terlihat dalam data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan keberterimaan konsep Islam dalam keuangan yang mendapat tempat pada nasabah. Seperti dikemukakan pada bagian pendahuluan, pertumbuhannya menunjukkan kecenderungan yang positif. BMT awal pertumbuhannya tahun 1990-an, jumlahnya 3.000 unit. Akhir tahun 2005 jumlah BMT yang sehat tinggal 2.017 unit. Tahun 2010 menurut Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) meningkat kembali menjadi sekitar 3.307 unit. Tahun 2016 jumlah BMT

menurut Asosiasi BMT Seluruh Indonesia (ABSINDO) mencapai 5000.²³

Pertumbuhan ini juga didukung dengan persebaran yang baik terutama di wilayah perkotaan Jawa dan Sumatera. Persebarannya menjadi bagian yang penting sebagaimana terlihat dalam laporan triwulanan tahun tersebut.

Tabel 1

Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi

Lokasi Bank Penyalur	Porsi TW I 2015	Porsi TW II 2015	Porsi TW III 2015
DKI Jakarta	42%	41,6 %	41,7%
Jawa Barat	13%	13%	13,1%
Jawa Timur	9%	9,5%	9,5%
Jawa Tengah	6%	5,9%	6%
Sumatera Utara	4%	3,6%	3,8%
Lain-lain	26%	26,4%	25,9%
TOTAL	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Industri Perbankan Triwulan I6, II7, dan III8 Tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

C. Metode

Untuk menggali konteks politik identitas dalam gerakan sosial ekonomi di perdesaan ini maka dilakukan pengamatan pada lingkungan penelitian. Wawancara dilakukan pada beberapa partisipan terutama aktor gerakan. Teknik-teknik tersebut dilakukan baik secara simultan maupun saling mengoreksi satu sama lain untuk mendapatkan keabsahan dan keajegan informasi yang diperoleh. Data tertulis dikumpulkan dari berbagai sumber penting. Semua informasi tersebut dianalisa secara kualitatif sampai tahap penarikan kesimpulan.

D. Politik Identitas Dalam Gerakan Sosial Ekonomi Islam di Arjasari

Identitas adalah konstruksi sosial, yaitu bahwa identitas dikonstruksi oleh masyarakat dan dalam proses ini berkaitan erat dengan pemilahan siapa aku dan siapa kamu, siapa kita (*we*) dan siapa mereka (*them*).²⁴ Dengan kata lain, pengkonstruksian identitas ini menyangkut proses inklusi-eksklusi. Berbeda dengan identitas, politik identitas menurut Campbell sebagai *'a conception of identity that is constructed for a particular purpose within a political theory. The relevant considerations and the purpose of the conception determine the facts about that notion of identity. Thus, in assessing political identity the primary points of contention are precisely the normative considerations, the purpose of the conception of political identity within the theory, and indeed even the political theory itself'*.²⁵ Politik identitas bagi Bagir adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarginalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok.²⁶

Menurut Weber, manusia melakukan suatu tindakan karena mereka menyadari melakukan hal tersebut untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. Tindakan yang muncul kemudian merupakan perwujudan dari bentuk kesadaran manusia tersebut. Kesadaran tersebut membentuk, apa yang disebut oleh Weber sebagai struktur sosial, sedangkan cara hidup merupakan produk dari pilihan yang termotivasi.²⁷ Dalam pandangan ini makna dari sebuah tindakan menjadi sangat penting. Kesadaran individu ini mendorong manusia melakukan pilihan-pilihan yang dipandang strategis sebagai sebuah bentuk survival strategi mereka menghadapi lingkungan fisik dan sosialnya.

Islam sebagai agama sekaligus menjadi dasar dari sistem nilai yang menjadi pedoman pemeluknya. Atas dasar ini, maka dapat dimengerti bahwa umat Islam Indonesia yang menempati posisi mayoritas memiliki cita-cita untuk menjadikan Islam sebagai sandaran dalam bertindak

termasuk dalam aktivitas ekonomi. Cita-cita ini mewujudkan dalam gerakan-gerakan sosial baik berdimensi politik maupun ekonomi.

Gerakan-gerakan sosial yang berlangsung dapat dikatakan memiliki identitas tertentu yang diusungnya. Identitas ini menjadi penanda sekaligus *framing* atas gagasan 'perlawanan' yang digulirkan. Islam, dalam beberapa peristiwa menjadi identitas penting dalam sebuah gerakan. Bukan hanya dalam konteks nasional, gerakan di Turki menunjukkan peran Islam sebagai identitas dalam gerakan sosial yang terjadi.²⁸ Wictorowicz²⁹ juga melihat dalam gerakan Islam, syariah adalah salahsatu *framing* atau *generalized belief* yang ditawarkan sebagai pengganti atas ketakberdayaan idiologi yang sedang berlangsung dalam memelihara keadilan Sosial. Gerakan-gerakan perlawanan yang muncul di Timur Tengah lahir karena *frame* demikian selain faktor-faktor lainnya.

Konstruksi Islam sebagai identitas gerakan kiranya dapat dijadikan basis dalam melihat fenomena di Arjasari. Ketika lebih memilih BMT sebagai bentuk pembiayaan, bukan bentuk lainnya seperti koperasi. BMT Dana Akhirat di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari dibentuk oleh komunitas Majelis Ta'lim Al Falah. Relasi ini menarik, di satu sisi Majelis Ta'lim sebagai representasi pranata keagamaan, dan BMT sebagai praksis gerakan ekonomi. Islam tampak menjadi identitas atas kehadiran BMT dari Majelis Ta'lim ini.³⁰

Menurut Alasuutari,³¹ dalam menganalisis konsep konstruksi identitas sebagai sebuah proses tidak dapat dilepaskan dari empat konsep penting yang tidak dapat dipisahkan yaitu (1) posisi dari subjek, (2) legitimasi, (3) strategi peniruan, serta (4) kesadaran kelompok. Berdasarkan empat konsep tersebut, gerakan sosial ekonomi Islam di Arjasari dibedah.

1. Posisi dan Subjek

Seperti dikemukakan oleh Smelser, *setting* sosial menjadi penting dalam aspirasi gerakan.³² Maka untuk memahami bagaimana kelahiran gerakan ekonomi Islam di Arjasari, terlebih dahulu dipahami konteks

sosial ekonomi yang mana ekologi menjadi rujukan sekaligus sebagai lingkungan gerakan.

Arjasari adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung. Sebagai wilayah administratif yang terletak di pegunungan, Arjasari memiliki kontur yang bergelombang, lembah dan perbukitan yang menjadi ciri khasnya. Pada umumnya memiliki ketinggian lebih kurang 850 meter dari permukaan laut.³³ Dengan wilayah demikian, maka menjadi wajar adanya bahwa lahan tersebut lebih dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.³⁴ Sebagaimana terlihat dalam tabel-tabel berikut, bahwa posisi pertanian baik berupa pertanian lahan basah maupun kering mendominasi pemanfaatan lahan.

No	Desa	Luas Lahan Sawah (Hektar)	Luas Lahan Non Sawah (Hektar)	Total
1	Batukarut	63,20	114,60	177,80
2	Mangunjaya	145,40	221,80	367,20
3	Mekarjaya	110,10	211,90	322,00
4	Baros	195,10	224,60	419,70
5	Lebakwangi	87,70	229,00	316,70
6	Wargaluyu	128,40	334,60	463,00
7	Arjasari	99,00	669,80	768,80
8	Pinggirsari	86,00	785,00	871,00
9	Patrolsari	105,00	442,80	547,80
10	Rancakole	198,00	109,80	307,80
11	Ancolmekar	152,00	220,80	373,50
Jumlah		1.370,60	3.564,70	4.935,30

Tabel 2

Pemanfaatan Lahan di Kecamatan Arjasari

Sumber: BPS Kab. Bandung, *Kacamatan Arjasari dalam Angka 2016*

No	Desa	Luas Lahan Sawah (Hektar)	Luas Lahan Non Sawah (Hektar)	Total
1	Batukarut	63,20	114,60	177,80
2	Mangunjaya	145,40	221,80	367,20
3	Mekarjaya	110,10	211,90	322,00
4	Baros	195,10	224,60	419,70
5	Lebakwangi	87,70	229,00	316,70
6	Wargaluyu	128,40	334,60	463,00
7	Arjasari	99,00	669,80	768,80
8	Pinggirsari	86,00	785,00	871,00
9	Patrolsari	105,00	442,80	547,80
10	Rancakole	198,00	109,80	307,80
11	Ancolmekar	152,00	220,80	373,50
Jumlah		1.370,60	3.564,70	4.935,30

Tabel 3

Pemanfaatan untuk pertanian lahan basah dan kering

Sumber: BPS Kab. Bandung, *Kacamatan Arjasari dalam Angka 2016*

Lahan tersebut dikelola oleh penduduk Arjasari yang bekerja sebagai petani.³⁵Mereka yang memilih untuk menjadi petani memiliki jumlah yang jauh lebih besar *ketimbang* pilihan pekerjaan lainnya.³⁶Mereka yang bertani memiliki komoditas tertentu yang menjadi andalan dalam ekonomi keluarga.³⁷Sebagian besar adalah petani pada kebutuhan pangan seperti palawija dan hortikultura, kedua adalah peternak dan terakhir mereka yang menanam komoditas perkebunan.³⁸

Pilihan-pilihan pembangunan perekonomian perdesaan diatas adalah mengikuti kondisi lingkungan yang dominan.Memasuki era masa ini, kondisi demikian bukan tanpa tantangan.Pembangunan ekonomi memerlukan suplai anggaran yang memadai terutama dari sektor perbankan.Berdasarkan pemantauan, di Arjasari hanya ada satu unit Bank yang membuka layanan bagi masyarakat.Bank

inipun berkedudukan di desa yang berbatasan dengan Kecamatan Pameungpeuk. Hal ini berarti ada dipinggiran Arjasari, dan cenderung mencari nasabah pada daerah perkotaan, di jalur utama Jalan Raya Banjaran. Atas kondisi demikian, tentu menjadi persoalan tersendiri dalam pembangunan ekonomi perdesaan.

Ada dua hal yang muncul dari gambaran di atas. Pertama, melahirkan peluang bagi rentenir (pelaku riba) untuk masuk ke wilayah Arjasari dengan menawarkan pembiayaan yang pada prinsipnya bukan menolong, melainkan memeras. Sebagaimana dikonfirmasi kepada beberapa tokoh setempat, praktik riba ini memang terjadi.³⁹ Banyak diantara penduduk setempat yang terjerat oleh praktik pembiayaan yang menjerat ini.⁴⁰ Atas dasar itu melahirkan peluang kedua, yaitu membentuk lembaga keuangan mandiri seperti koperasi dan BMT. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, menunjukkan pada tahun 2014 ada 28 Koperasi yang aktif dari 52 koperasi yang ada.⁴¹ Menurut Aep,⁴² sejumlah koperasi tersebut juga sesungguhnya meliputi BMT.

Gerakan sosial ekonomi Islam tumbuh dan berkembang melalui BMT di pedesaan Indonesia khususnya Jawa. Pembentukan dan pertumbuhannya menjadi alternatif sistem ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat pedesaan menjadi faktor penting, di luar aktor penggeraknya.

2. Kesadaran Kelompok, Strategi dan Legitimasi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat secara sosiologis merupakan bagian integral dari hubungan-hubungan sosial suatu masyarakat. Pengaturan ekonomi tidak bertindak untuk menjaga kepentingan-kepentingan individual terkait dengan kepemilikan barang-barang. Setiap langkah dalam proses ekonomi menyesuaikan dengan beberapa kepentingan sosial, yang merupakan dasar bagi tindakan ekonomi. Oleh karenanya beberapa sistem ekonomi beroperasi atas dasar motif-motif non ekonomi. Dinamika ekonomi masyarakat pedesaan dipengaruhi pula aspek non ekonomi yang berkaitan dengan budaya, politik dan

keagamaan. Beberapa aspek non ekonomi mewarnai corak sistem dan praktik berekonomi. Proses ekonomi menjadi tidak bisa lepas dari persoalan–persoalan sosial budaya, politik dan keagamaan masyarakat.⁴³ Situasi yang kondusif akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Termasuk juga perubahan–perubahan sistemik dalam aspek ekonomi masyarakat.

Arjasari yang memenuhi unsur perdesaan⁴⁴ dan dilihat dari komposisi pemeluk agama penduduknya mayoritas Islam, menjadi wajar adanya penerimaan terhadap pilihan kepada BMT menjadi primer.

No	Desa	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
1	Batukarut	11.487	48	12	0	0
2	Mangunjaya	7.746	0	25	0	0
3	Mekarjaya	5.833	0	0	0	0
4	Baros	8.739	0	0	0	0
5	Lebakwangi	11.293	14	6	0	1
6	Wargaluyu	7.525	0	11	0	0
7	Arjasari	10.375	45	0	0	0
8	Pinggirsari	10.361	6	0	0	0
9	Patrolsari	8.038	0	0	0	0
10	Rancakole	9.807	0	0	0	0
11	Ancolmekar	5.162	0	0	0	0
Total		96.366	113	54	0	1

Tabel 4

Pemelukan Agama Penduduk Arjasari

Sumber: BPS Kab. Bandung, *Kacamatan Arjasari dalam Angka 2016*

Melihat komposisi pemeluk Agama Islam berdasarkan tabel tersebut, mengingatkan tentang Islam adalah Sunda dan Sunda adalah Islam.⁴⁵ Karena Arjasari berada di wilayah Bandung dan secara

geografis berarti berada di wilayah Sunda. Masyarakat yang tumbuh dan menggunakan budaya Sunda dalam kesehariannya. Namun juga sekaligus sebagai Muslim yang terikat oleh sejumlah tata nilai dan norma Agama Islam. Hal ini juga berarti mendorong mereka untuk mencoba menerapkan perangkat tata nilai tersebut dalam kesehariannya (*kaaffah*) termasuk dalam pilihan berekonomi.⁴⁶ Studi Yadi Janwari⁴⁷ di Tasikmalaya tentang dorongan agama dalam semangat kewirausahaan, kiranya dapat membantu menjelaskan bagaimana masyarakat pedesaan di Arjasari yang Muslim ini memiliki semangat yang mirip untuk maju dalam sistem nilai Islam.

Kesadaran ini melahirkan bentuk gerakan yang bermula dari Majelis Taklim ke aktifitas penguatan keekonomian melalui BMT.⁴⁸ Pada tahun 2000 seiring dengan semakin menguatnya sentimen identitas keislaman pasca reformasi, BMT dipilih sebagai wadah gerakan. BMT ini bermula sama namanya dengan nama Majelis Taklim yang menjadi bidannya, yaitu Al Falah.⁴⁹ Namun kemudian dalam perjalanannya, karena ada kemiripan dengan lembaga lain yang sudah ada, nama BMT berubah menjadi Dana Akhirat.⁵⁰ Aep, lebih lanjut menjelaskan bahwa memilih nama Dana Akhirat sendiri untuk membedakan dengan pihak lain, terutama agar BMT ini menjadi bagian dari gerakan yang bersumberkan pada pemahaman agama dan kesadaran *religious* bahwa manusia adalah tamu di muka bumi dan akan kembali ke akhirat. Dana Akhirat dapat dimaknai sebagai bekal (dana) dalam perjalanan singkat (dunia) menuju rumah abadi yakni akhirat.⁵¹

Praktik ekonomi Islam secara kelembagaan dan kehidupan sehari-hari di pedesaan akan tercapai secara bertahap, Karnoen Perwataatmadja⁵² menjelaskannya dalam tiga tahapan meliputi; *pertama*, tahap pengenalan (*introduction*), ekonomi Islam dijalankan terlebih dahulu dengan segala keterbatasan yang ada. Masyarakat mengenal secara luas tentang lembaga ekonomi Islam, yang secara prinsip berbeda dengan ekonomi konvensional, sehingga bisa menerima keberadaannya. *Kedua*, tahap pengakuan, merupakan pembuktian keunggulan komparatif ekonomi

Islam dengan ekonomi konvensional. Dukungan pemerintah sangat penting terutama dalam hal regulasi. *Ketiga*, tahapan pemurnian, merupakan tahap pemahaman secara mendalam dan mengerti perbedaan mendasar ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.

Kesadaran kelompok di atas dalam pilihan strategi identitas ekonomi Islam dengan pembentukan BMT mendapatkan legitimasinya. Studi Aspiranti⁵³ yang menunjukkan bahwa BMT memiliki peluang untuk memiliki kinerja lebih baik mengingat dukungan modal dan akses eksternal yang terbuka. Temuannya ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar perbandingan Koperasi dengan BMT
Sumber: Tasya Aprianti dan Dede R Oktini, 2011.

BMT sebagai lembaga keuangan syariah memiliki dua aktivitas utama sebagaimana namanya yang merupakan gabungan dari *baitul mâl* dan *bait at tamwil*. Sebagai *baitul mâl* yaitu lembaga penghimpun dana umat berupa zakat, infak dan sedekah juga mendistribusikannya kepada *mustahiq*. Sedangkan sebagai *bait at tamwil*, yaitu aktivitas ekonomi melalui penyediaan pembiayaan syariah yang bebas riba bagi pengusaha mikro bisa dalam bentuk *mudhorobah*, *musyarokah* maupun *murobahah*.⁵⁴ Jadi, BMT seperti dinyatakan Yadi Januari, beroperasi dengan prinsip bagi

hasil (*profit and loss sharing*).⁵⁵ Prinsip ini melahirkan fungsi BMT yang berdimensi *profit oriented* sekaligus *social oriented*.⁵⁶

Sebagai lembaga yang memiliki misi *social oriented*, konsep baitul mal yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari BMT merupakan kelanjutan dari semangat yang sama di zaman nabi Muhammad s.a.w. dan para khalifahnyanya. Lembaga serupa itu bergerak dalam misi sosial keagamaan yaitu menampung dan mendistribusikan dana umat waktu itu. Namun demikian ada perbedaannya. Baitul mal di masa nabi Muhammad s.a.w. serta para khalifahnyanya (termasuk masa pemerintahan Islam berikutnya), juga menjadi lembaga keuangan dan ekonomi negara yang berfungsi untuk menangani harta umat serta mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Jadi, dalam konteks masa sekarang, baitul mal ini lebih menyerupai makna harfiahnya yaitu sebagai rumah dana.⁵⁷

Menurut Hendi Suhendi⁵⁸ ada empat ciri utama BMT, yaitu 1) berorientasi bisnis dalam bentuk mencari laba bersama untuk kesejahteraan bersama. 2) Bukan lembaga sosial, namun dapat bergerak dalam kegiatan sosial seperti perhimpunan dana sosial umat baik berupa zakat, infak, maupun sedekah, hibah juga wakaf. 3) BMT dibangun berdasarkan swadaya umat, untuk kesejahteraan umat. 4) BMT menjadi milik bersama diantara kalangan umat dengan ekonomi kecil di lingkungannya. Didiek mengutip Aziz,⁵⁹ dari empat ciri di atas ada ciri kelima yaitu bergerak dengan prinsip bagi hasil. Prinsip ini sebagai ciri khas BMT sekaligus merupakan penjabaran moral Islam yang menolak bunga riba.

BMT berdasarkan kerangka ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan penting yaitu, 1) membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program mengentaskan kemiskinan. 2) Memberikan sumbangan aktif terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat. 3) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah. 4) Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung. 5) Menumbuhkan usaha-usaha yang produktif sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi

anggota di bidang usahanya. 6) Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan perekonomian Islam. 7) Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman. 8) Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.⁶⁰

BMT dipandang memiliki peluang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut di atas. Hal ini didukung oleh argument pemikiran sebagai berikut: 1) BMT sebagai organisasi ekonomi dikelola secara professional. 2) Pengelola dan pengurusnya dilatih dan dikembangkan secara sistematis. 3) Perkembangannya dipantau dan diarahkan secara jelas dan terencana. 4) BMT terlibat dalam jaringan nasional bahkan internasional, sehingga terlibat dalam arus utama pembangunan. 5) BMT memberikan pembiayaan dan membina usaha kecil bahkan para pemula agar mampu mengatasi masalah ekonomi yang mereka hadapi. 6) BMT membina anggotanya secara sistematis dan terencana agar mampu memanfaatkan penghasilan menuju peningkatan kesejahteraan. 7) BMT berada dan dimiliki oleh masyarakat sehingga bisa berkesinambungan dan mandiri.⁶¹

BMT sebagai bagian dari arus utama dalam pengentasan kemiskinan kaum ekonomi bawah juga ditopang oleh beberapa pemikiran berikut: 1) BMT berada dalam masyarakat dan dekat dengan mereka sehingga pengelola dan pengurus BMT bisa mengidentifikasi anggota masyarakat yang masih miskin secara tepat dan benar. 2) Pengelola dan pengurus BMT juga mampu melihat peluang usaha yang ada sehingga bisa mengarahkan anggotanya yang memerlukan pengembangan usaha agar terjadi peningkatan pendapatan. 3) BMT mampu mengorganisir masyarakat yang membutuhkan pembinaan sebagai kelompok khusus dalam jajaran anggotanya. 4) Pengelolaan dana oleh BMT dilakukan secara professional sehingga memiliki akuntabilitas. 5) BMT mampu menggulirkan dana yang dihimpun kepada masyarakat lain yang membutuhkan sehingga terjadi pemerataan kesempatan.

BMT sebagai lembaga keuangan syariah ini telah terbukti membantu penguatan ekonomi kelas bawah ketika Indonesia terkena dampak krisis moneter dunia pada tahun 1997.⁶² Kekuatan BMT ini disinyalir karena menggunakan sistem non bunga yang berarti terbebas dari pengaruh sentimen ekonomi dunia yang melemah. Prinsip non bunga inilah yang menjadikan lembaga keuangan syariah bisa mandiri.⁶³

Hal yang senada ditemukan dalam perkembangan BMT Dana Akhirat, semenjak didirikan pada tahun 2000 sampai saat ini telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Dari asset dana yang dikelola sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), kini mencapai 8,5 Milyar.⁶⁴ Keberadaannya mampu menjadi oase ditengah kelangkaan lembaga keuangan yang mau masuk ke wilayah Arjasari. Meskipun sejatinya ada juga lembaga keuangan yang bersifat ribawi dan menjerat penduduk yang menjadi nasabahnya dengan bunga berlipat, atas kondisi ini BMT Dana Akhirat menjadi penawar yang tepat. Hadirnya BMT Dana Akhirat ini meneguhkan identitas dalam hubungan ekonomi dan agama di Arjasari.

Keanggotaan BMT Dana Akhirat, sampai tahun 2018 telah mencapai 894 orang dari 1515 orang terdaftar sebagai anggota⁶⁵ Jika dilihat perbandingan dengan jumlah keseluruhan penduduk Arjasari maka angka ini baru menyerap 1.8 %. Meski demikian, kondisi ini menunjukkan implementasi menjadi Islam yang "taat" pada berbagai aspeknya termasuk ekonomi, sekaligus tidak kehilangan tempat dalam kesempatan pembangunan ekonomi. Apa yang ditemukan tentang peran identitas dalam gerakan ekonomi, mirip dengan temuan Yavuz⁶⁶ yang menunjukkan bentangan ruang peluang telah menjadi fasilitas untuk lahirnya sebuah gerakan dengan mengeksplorasi makna, identitas dan norma budaya. Dalam konteks di Arjasari, *setting* sosial muslim pinggiran yang termarjinalkan dalam fasilitas pembiayaan konvensional telah diubah menjadi peluang gerakan sosial ekonomi Islam melalui BMT.

E. Penutup

BMT dalam peran dan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro dalam bentuk koperasi jasa keuangan syariah untuk pembiayaan dan penyimpanan dana anggota, menjadi sarana efektif menjalankan prinsip-prinsip ekonomi Islam di pedesaan. Pertumbuhan dan perkembangannya menjadi lebih mudah dan meluas karena kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan yang dinamis dan terbuka. Juga adanya politik identitas Islam yang tampak dalam struktur sosial masyarakat pedesaan dengan mayoritas beragama Islam. Kekuatan politik identitas ini juga mendapatkan tempat melalui kesadaran, strategi dan legitimasi. Legitimasi atas pilihan ekonomi Islam sebagai basis gerakan telah teruji dalam ketangguhannya yang berlaku dalam skala nasional.

Daftar Pustaka

- Agustianto. *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Cipta. Pustaka Media. 2006.
- Ahmed el Ashker and Rodney Wilson, *Islamic Economic, a short history*. Leiden-Boston, Brill: 2006.
- Alasuutari, Pertti. *Social Theory and Human Reality*. London: SAGE Publications Ltd., 2004.
- Anif Punto Utomo, *Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam*. Jakarta: Gress Publishing Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2014.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, *Kabupaten Bandung dalam Angka 2016*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, *Kecamatan Arjasari dalam Angka 2016*.
- Bagir, Zainal Abidin. "Pluralisme Kewargaan: Dari Teologi ke Politik", dalam Zainal Abidin Bagir, dkk., *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, Yogyakarta: CRCS UGM bekerja sama dengan penerbit Mizan, 2011.
- BAPPENAS, *Laporan Perencanaan Tahun 2010*
- Charles Tripp, *Islam and the Moral Economy the Challenge of Capitalism*. Cambridge University Press, 2006.
- Catherine Galko Campbell, *Persons, Identity, and Political Theory*. Springer Dordrecht Heidelberg London NewYork, 2014.
- Fiona Bowie, *the Anthropology of Religion*. Oxford: Blackwell Publishers, 2001.
- James C.Scott. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press, 1976.
- Hollan, Dorothy, William Lachicotte Jr, Debra Skinner, Carole Cain. *Identiy and Agency in Cultural World*. London, England: Harvard

- University Press, 1998.
- Jones.Pip.*Pengantar Teori-teori Sosial---dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2009.
- Karnaen Perwata Atmaja dan Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimaa Bank Islam*. Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1992.
- Masudul Alam Choudhury, *The universal paradigm and the Islamic World-System: economy, society, ethics and Science*, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2007.
- M. Hakan Yavuz, *Islamic Political Identity in Turkey*, Oxford University Press, 2009.
- M. Hakan Yavuz "Opportunity Spaces, Identity, and Islamic Meaning in Turkey", in Q. Wiktorowicz (ed.), *Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach*. Bloomington: Indiana University Press, 2004.
- M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, trans. Ikhwan Abidin Basri, Depok: Gema Insani, 2000.
- _____, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir, et. al. Jakarta: Penerbit SEBI, 2001.
- Neil J. Smelser, *Theory of Collective Behavior*, New York: Free Press, 1962.
- Quintan Wiktorowicz, *Islamic Activism: A Social Movement Theory*. Indiana: Indiana University Press. 2004.
- Syed Abul A'ala al Maududi, *Economic System of Islam*, Langre Pakistan: Islamic Publication, Ltd.
- Yadi Janwari, *Entrepreneurship of Traditional Muslim in Tasikmalaya Indonesia*, Scholar Press, 2015.

Jurnal

- Abdul Syukur, 'Islam, Etnisitas, dan Politik Identitas: Kasus Sunda', *MIQOT* Vol. XXXV No. 2 Juli-Desember 2011.
- Agus Ahmad Safei, 'The Development of Islamic Society Based On Celestial Business', Walisongo: *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No. 1, Mei 2016.

- _____, 'Development of Islamic Society Based on *Majelis Ta'lim*: A Study of the Shifting Role of the *Majelis Ta'lim* in West Java', *American Journal of Applied Sciences* 2016, 13 (9).
- Ahmad Maulidizen, 'Riba, Gharar dan Moral Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur', *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 7 No. 2 Juli - Desember 2016.
- Banjaran Surya Indrastomo, 'The Emergence of Islamic Economic Movement in Indonesia: A Political Economy Approach', *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 9, March 2016.
- Firman Nugraha, 'The Role of Majelis Taklim in Social Dynamic of Muslims', *Jurnal Bimas Islam* Vol.9 No.III 2016.
- Sugito dan Siti Julaeha, 'Economic Empowerment and Correlation on the Quality of Religion', *Jurnal Bimas Islam* Vol.9 No.III 2016.
- Tasya Aspiranti dan Dede R Oktini, 'Kinerja Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Bandung' *Prosiding SNaPP2011: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 2011.
- Thohir Yuli Kusmanto Titik Sumarti, dkk., *Gerakan Sosial Ekonomi*, *Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 1 Mei 2016.
- Shofwan Al Banna, Choiruzzad, 'More Gain, More Pain: The Development Of Indonesia's Islamic Economy Movement (1980s-2012s)' *Indonesia*; Apr 2013.

Internet

<http://www.icmi.or.id/organisasi/sejarah>.

<http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>.

<http://www.reuters.com>.

http://muhtadiridwan/2013/03/ketahanan-keuangan-syariah-dalam_11.html

Wawancara

Wawancara dengan Pengelola BMT Dana Akhirat

Endnotes

1. ICMI bermula dari embrio pertemuan cendekiawan Muslim pertama tahun 1984 yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia, MUI, dua universitas Islam, dan 4 lembaga swadaya masyarakat, yang dimotori oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat, LSAF. Pada tahun 1987 dalam suatu pertemuan cendekiawan muslim di kampus Universitas Djuanda, Bogor. Dari pertemuan ini berkembang gagasan untuk membentuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang kemudian pada tanggal 6 Desember 1990, Kongres pertama ICMI dilaksanakan dengan dibuka dan oleh Presiden Suharto waktu itu. Lebih jauh lihat dalam www.icmi.or.id/organisasi/sejarah.
2. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabi'uts Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar. Lebih jauh lihat dalam <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>. Lihat juga Anif Punto Utomo, *Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam* (Jakarta: Gress Publishing Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2014), 55.
3. Shofwan Al Banna, Choiruzzad, 'More Gain, More Pain: The Development Of Indonesia's Islamic Economy Movement (1980s-2012)' *Indonesia*; Apr 2013; 95; ProQuest Research Library, 125; lihat juga dalam Banjaran Surya Indrastomo, *The Emergence of Islamic Economic Movement in Indonesia: A Political Economy Approach*, *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 9 (March 2016), pp. 63–78

4. Agustianto. *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*. (Bandung: Cipta. Pustaka Media. 2006)
5. www.reuters.com, 2008. Pasca terjadinya "subprime mortgage" tak ada satu pun di antara negara-negara maju di dunia yang luput dari turbulansi krisis keuangan global tersebut. Pasca badai "subprime mortgage" itu, pertumbuhan ekonomi AS jatuh ke level minus 2,51 persen. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman dan Prancis pertumbuhan ekonominya juga turun masing-masing menjadi minus 4,1 persen, minus 3,8 persen dan minus 3,2 persen.

Sementara itu data BAPPENAS, 2010, menunjukkan bahwa ketika badai krisis yang sama menimpa negara-negara maju Asia, seperti Jepang pertumbuhan ekonominya pada tahun 2009 anjlok pada level minus 9,7 persen. Korea Selatan meski agak membaik sedikit dibanding Jepang, pada tahun yang sama pertumbuhan ekonominya positif 0,1 persen, sebelumnya mengalami pertumbuhan negatif. India dan Cina, India tercatat sebagai negara di Asia yang cepat memulihkan pertumbuhan ekonominya, dari pertumbuhan 4,5 persen pada tahun 2008 meningkat menjadi 5,8 persen pada tahun 2009. Sedang Cina, justru mengalami perlambatan, dari 6,8% menjadi 6,1 persen.

Begitu juga ketika terjadi krisis Keuangan yang melanda Yunani yang akhirnya harus di-bail-out Uni Eropa, daya imun *Islamic Finance* tetap teruji. Dengan kinerja keuangan Islam seperti itu di level global, maka sekarang ini di beberapa negara maju banyak yang mengadopsi sistem keuangan Islam. Jadi, tidak hanya di negara-negara Islam saja *Islamic Finance* bisa tumbuh subur.

6. http://muhtadiridwan/2013/03/ketahanan-keuangan-syariah-dalam_11.html
7. Thohir Yuli Kusmanto Titik Sumarti, dkk., Gerakan Sosial Ekonomi, *Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 1 Mei 2016 : 223 – 245.
8. Thohir Yuli Kusmanto Titik Sumarti, dkk., Gerakan Sosial ..., 223 – 245.
9. Herbert Blumer, 'Social Movement' dalam *Principle of Sociology*, ed. Alfred Mclung Lee (New York: Barnes&Noble, Inc., 1966), 210.
10. Oliver Roy, *the Failure of Political Islam*, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1994), 132.

11. Damsar, *Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 1.
12. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 1-2.
13. Charles Tripp, *Islam and the Moral Economy The Challenge of Capitalism* (Cambridge University Press, 2006)
14. Gagasan bangunan masyarakat Islam yang maju dengan bersandar pada tata nilai Islam misalnya dikemukakan oleh Agus Ahmad Safei, 'The Development Of Islamic Society Based On Celestial Business' Walisongo: *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No. 1, Mei 2016, 1-16
15. Ahmed el Ashker and Rodney Wilson, *Islamic Economic, a short history* (Leiden-Boston, Brill: 2006)
16. Banjaran Surya Indrastomo, 'The Emergence of Islamic Economic Movement in Indonesia: A Political Economy Approach', *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 9 (March 2016), pp. 63-78
17. M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, trans. Ikhwan Abidin Basri (Depok: Gema Insani, 2000), 7.
18. M. Umer Chapra, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir, et. al. (Jakarta: Penerbit SEBI, 2001), 131. Lihat juga tentang moral dalam James C.Scott. 1976. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia* (Yale University Press); Masudul Alam Choudhury, *The universal paradigm and the Islamic world-system : economy, society, ethics and Science* (World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2007), 55
19. Ahmad Maulidizen, 'Riba, Gharar dan Moral Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur', *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 7 No. 2 Juli - Desember 2016, 141 – 164.
20. Ahmad Maulidizen, 'Riba, Gharar dan Moral Ekonomi...', 141 – 164.
21. Charles Tripp, *Islam and the Moral Economy The Challenge of Capitalism* (Cambridge University Press, 2006), 92-93
22. Thohir Yuli Kusmanto Titik Sumarti, dkk., *Gerakan Sosial Ekonomi...*, 223 – 245.; Banjaran Surya Indrastomo, 'The Emergence of Islamic Economic Movement in Indonesia: A Political Economy Approach', *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 9 (March 2016), pp. 63-78

23. Thohir Yuli Kusmanto Titik Sumarti, dkk., *Gerakan Sosial Ekonomi...*, 223 – 245.
24. Fiona Bowie, *The Anthropology of Religion* (Oxford: Blackwell Publishers, 2001), h. 71. Identitas, dalam studi Antropologi dan studi budaya, lebih dilihat sebagai sebuah identitas budaya yang terwujud dalam bentuk komunikasi. Pada kondisi relasi yang bersifat asimetris ini, etnis dominan tidak hanya memiliki kekuasaan untuk menentukan identitas dominan tetapi juga memiliki kuasa untuk membuat klaim-klaim tentang 'siapa kita' dan 'bagaimana kita' harus berhubungan dengan 'yang lain'. Konstruksi sosial sangat menekankan pada bentuk-bentuk komunikasi yang terjadi satu dengan yang lain, tidak hanya sebatas penyampaian pesan tetapi juga pembuatan klaim-klaim tentang 'siapa kita' dan hubungannya dengan yang lain'. Identitas tersebut diwujudkan dalam praktek-praktek sosial yang dibangun dari dua sisi yaitu sisi individu dan sisi sosial. Pembentukan identitas ini sangat ditentukan oleh sejarah masa lalu dan keadaan masa sekarang, dan proses pembentukannya tidak dapat dilepaskan dari peran kekuasaan, siapa yang berperan membentuk dan mengendalikan klaim-klaim tersebut. Penggunaan klaim-klaim tersebut menjadi penting dalam menunjukkan identitas individu dalam suatu struktur sosial. Lihat dalam Hollan, Dorothy, William Lachicotte Jr, Debra Skinner, Carole Cain. *Identity and Agency in Cultural World*. (London, England: Harvard University Press, 1998.)
25. Catherine Galko Campbell, *Persons, Identity, and Political Theory* (Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2014), 11
26. Bagir, Zainal Abidin. "Pluralisme Kewargaan: Dari Teologi ke Politik", dalam Zainal Abidin Bagir, dkk., *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, (Yogyakarta: CRCS UGM bekerja sama dengan penerbit Mizan, 2011), 18.
27. Jones. Pip. *Pengantar Teori-teori Sosial---dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2009), 114
28. M. Hakan Yavuz, *Islamic Political Identity in Turkey*, (Oxford University Press, 2009)
29. Quintan Wictorowicz, *Islamic Activism: A Social Movement Theory*. (Indiana: Indiana University Press. 2004)

30. Bagaimana identitas mendorong terhadap gerakan dapat dilihat salahsatunya dalam riset Yavuz tentang gerakan Islam di Turki yang melibatkan makna, identitas dan sosial budaya setempat. Yavuz, M. H. "Opportunity Spaces, Identity, and Islamic Meaning in Turkey", in Q. Wiktorowicz (ed.), *Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach* (Bloomington: Indiana University Press, 2004), 270–288.
31. Alasuutari, Pertti. *Social Theory and Human Reality*. (London: SAGE Publications Ltd., 2004)
32. Smelser menyebutnya dengan *structural condusiveness* dan *structural strain*. Lebih jauh dapat dilihat dalam Neil J. Smelser, *Theory of Collective Behavior* (New York: Free Press, 1962)
33. BPS Kab. Bandung, *Kacamatan Arjasari dalam Angka 2016*
34. Tentang ikatan manusia dengan alam sebagai pola nafkah dapat dilihat dalam Ibn Khaldun, *Muqadimah*, 77-88 dan Clifford Geertz, *Involusi Pertanian...*, 19-38
35. James Scott, *the Moral Economy of Peasant...*, 35-55.
36. BPS Kab. Bandung, *Kacamatan Arjasari dalam Angka 2016*
37. Subsistensi dipahami sebagai cara hidup yang minimalis. Usaha-usaha sebagai cara hidup sekedar untuk mempertahankan hidup itu sendiri. Secara ekonomi, subsistensi merupakan ekonomi alamiah yang tidak tergantung kepada pasar dalam memenuhi konsumsinya. Konsep ini menjadi ciri kehidupan masyarakat perdesaan ala Tonnie dengan *Gemeinschaft* dengan berlakunya prinsip *wessenville*. Lebih jauh tentang ekonomi subsistensi petani (*peasant*) dapat dilihat dalam James Scott, *the Moral Economy of Peasant...*, 35-55.
38. BPS Kab. Bandung, *Kacamatan Arjasari dalam Angka 2016*
39. Mahbub Basyari, Penyuluh Agama, *Wawancara*, 4 Januari 2017
40. H. Aep, pengurus BMT, *Wawancara*, 4 Januari 2017
41. BPS, *Kabupaten Bandung dalam Angka 2016*, 250
42. Pengelola BMT Dana Akhirat, *wawancara*, Januari 2017

43. Rodney Stark and Roger Pinke, *Acts of Faith* (California: University of California Press, 2000); lihat juga dalam Roger Finke and Rodney Stark, 'The Dynamics of Religious Economies', dalam Michele Dillon (ed), *Handbook of Sociology of Religion* (New York: Cambridge University Press, 2003), 96-109.
44. Tentang konsepsi desa dan cirinya bisa dilihat dalam R. Bintarto, *Suatu Pengantar Geografi Desa* (Yogyakarta: DIY Soring, 1969); R. Bintarto, *Interaksi Desa-Kota* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989)
45. Abdul Syukur, 'Islam, Etnisitas, dan Politik Identitas: Kasus Sunda' *MIQOT* Vol. XXXV No. 2 Juli-Desember 2011
46. Masudul Alam Choudhury, *the Universal Paradigm and the Islamic World-System: Economy, Society, Ethics and Science* (World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2007), 55
47. Yadi Janwari, *Entrepreneurship of Traditional Muslim in Tasikmalaya Indonesia* (Scholar Press, 2015)
48. Konsep pemberdayaan ekonomi umat melalui Majelis Taklim lihat juga dalam Sugito dan Siti Julaeha, 'Economic Empowerment and correlation on the Quality of Religion', *Jurnal Bimas Islam* Vol.9 No.III 2016, 405-444.
49. Bagaimana Majelis Taklim dapat memiliki peran strategis dalam pembangunan umat dapat dilaihat dalam Agus Ahmad Safei, 'Development of Islamic Society Based on *Majelis Ta'lim*: A Study of the Shifting Role of the *Majelis Ta'lim* in West Java' *American Journal of Applied Sciences* 2016, 13 (9): 947-952; lihat juga dalam Firman Nugraha, 'The Role of Majelis Taklim in Social Dynamic of Muslims', *Jurnal Bimas Islam* Vol.9 No.III 2016, 469-498.
50. H. Aep, pengurus BMT, *Wawancara*, 4 Januari 2017.
51. H. Aep, pengurus BMT, *Wawancara*, 4 Januari 2017.
52. Karnaen Perwataatmaja dan Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimaa Bank Islam* (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1992).
53. Tasya Aspiranti dan Dede R Oktini, 'Kinerja Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Bandung' *Prosiding SNaPP2011: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 2011.

54. Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan...*, 14.
55. Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian...*, 107.
56. Hendi Suhendi, *'Baitul Mal wa Tamwil...*, 31.
57. Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan...*, 24
58. Hendi Suhendi, *'Baitul Mal wa Tamwil...*, 29-30.
59. Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan...*, 25-26
60. Hendi Suhendi, *'Baitul Mal wa Tamwil...*, 33.
61. Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan...*, 31.
62. Hendi Suhendi, *'Baitul Mal wa Tamwil...*, 38.
63. Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 50.
64. Wawancara dengan Pengelola dan Data Laporan Musyawarah Anggota Tahunan, Tahun Buku 2017.
65. Wawancara dan data keanggotaan BMT, 4 Januari 2018
66. M. Hakan Yavuz "Opportunity Spaces, Identity, and Islamic Meaning in Turkey", in Q. Wictorowicz (ed.), *Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach*. (Bloomington: Indiana University Press, 2004), 270-288; atau masih oleh penulis yang sama dalam M. Hakan Yavuz, *Islamic Political Identity in Turkey*, (Oxford University Press, 2009).